

DFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Sistematika Penulisan.....	1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBUJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	1
2.1. Ekonomi Makro.....	1
2.2. Kebijakan Keuangan.....	1
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	1
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA.....	1
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja.....	1
3.2. Hambatan dan Kendala Realisasi Pencapaian Target Kinerja.....	1
BAB IV KEBUJAKAN AKUNTANSI.....	1
4.1. Etika Akuntansi dan Etika Pencapaian Keuangan.....	1
4.2. Basis Akuntansi.....	1
4.3. Basis Pengukuran.....	1
4.4. Penerapan Kebijakan.....	1
BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN.....	1
5.1. Rincian dan Penjelasan.....	1
BAB VI PENUTUP.....	1
6.1. Kesimpulan.....	1
6.2. Saran.....	1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KANTOR CAMAT BAYANG

PER 31 DESEMBER 2017

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Sistematika Penulisan.....	1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	1
2.1. Ekonomi Makro.....	1
2.2. Kebijakan Keuangan.....	1
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	1
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	1
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	1
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja.....	1
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	1
4.1. Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan.....	1
4.2. Basis Akuntansi.....	1
4.3. Basis Pengukuran.....	1
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	1
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	1
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos.....	1
BAB VI PENUTUP.....	1
6.1. Kesimpulan.....	1
6.2. Saran.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Camat bayang Kabupaten Pesisir selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi,, Tugas Pokok Fungsi tata kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural di Lingkungan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Camat Bayang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

Kantor Camat Bayang dipimpin oleh seorang Camat (Eselon IIIa), dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IIIb, 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon IVa dan 2 (dua) orang Pejabat Struktural Eselon IVb, yaitu:

1. Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian perencanaan keuangan dan pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Administrasi Kependudukan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan pemberdayaan
5. Seksi Kesejahteraan rakyat.
6. Seksi Ketentraman dan ketertiban

Struktur Organisasi Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016:

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disampaikanlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Rancangan Peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- f. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
- k. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang APBD
- l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab, setiap bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Basis Pengukuran
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/ pengusulan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kecamatan, Kantor Camat Bayang diharuskan mampu menyelenggarakan kewenangan urusan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan langkah :

- a) Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan menerapkan Sistim Pelayanan Minimal
- b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur keuangan dan tenaga kepegawaian
- c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Nagari
- d) Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan di bidang pengeluaran digunakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan seperti ;

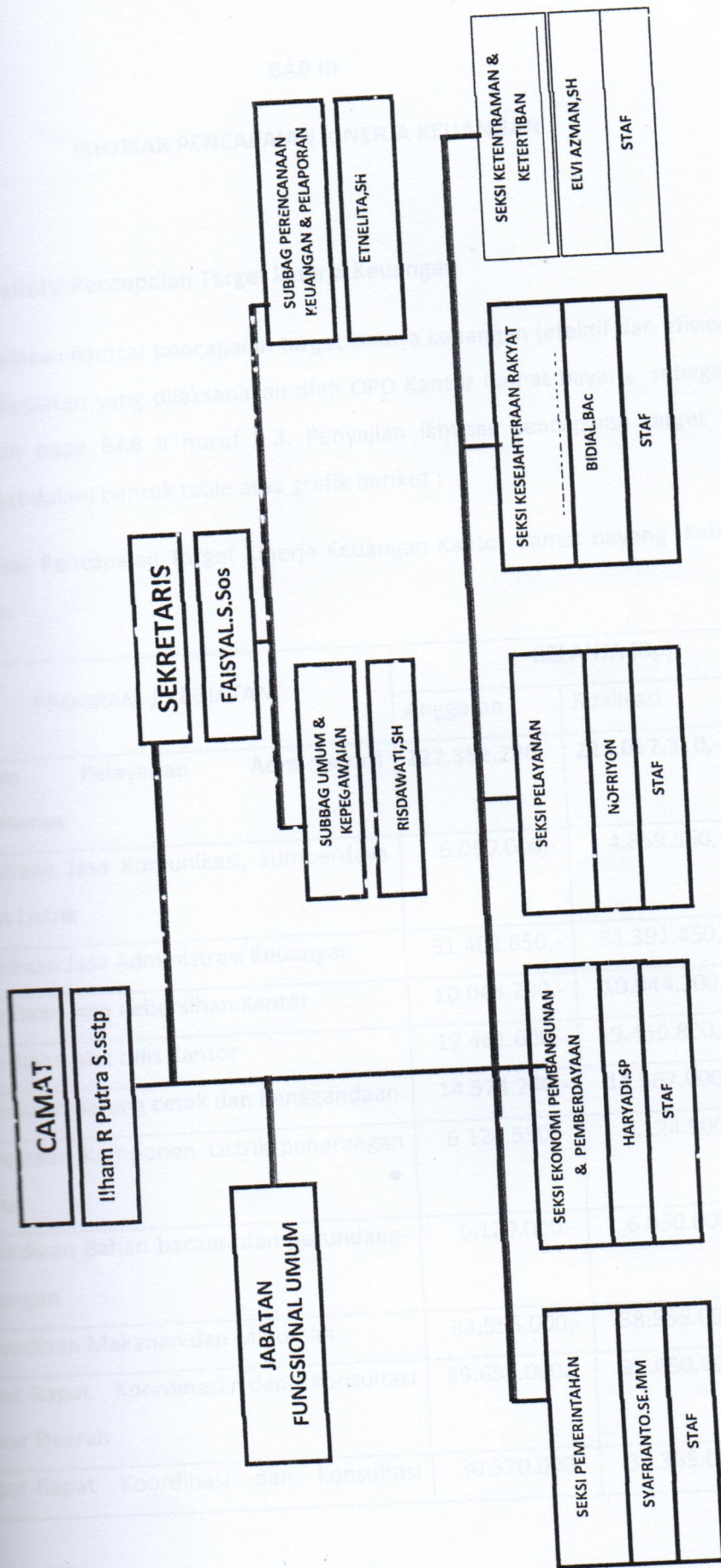
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran OPD

- ### 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program/ kegiatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT BAYANG

PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2016



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektif dan efisien) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kantor Camat bayang sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk table atau grafik berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Camat bayang Kabupaten Pesisir selatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	222.352.280,-	221.057.310,-	97,63,
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	6.050.000,-	4.859.360,-	80,32
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51.402.850,-	51.391.450,-	99,98
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.044.200,-	10.044.200,-	100
5.	Penyediaan Alat tulis Kantor	19.461.600,-	19.450.800,-	99,95
6.	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	14.574.240,-	14.567.000,-	99,95
7.	Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Kantor	6.124.590,-	6.124.500,-	100.
8.	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	6.120.000,-	6.050.000,-	98,86
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.555.000,-	38.555.000,-	100
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	39.650.000,-	39.650.000,-	100
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi	30.370.000,-	30.365.000,-	99,98

	Dalam Daerah	12.972.500,-	12.972.500,-	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.821.850.-	86.665.850.-	99,82
11	Pengadaan Peralatan gedung kantor	70.755.000.-	70.736.500.-	99,97
12	Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah dinas	3.303.000,-	3.303.000.-	100
13	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas	12,763.850.-	12.626.350,-	98,92
c	Program kapasitas sumber daya aparatur	13.500.000,-	9.000.000,-	
14	Program Pendidikan dan pelatihan pormal	13.500.000.-	9.000.000.-	85,71
d	Program Pengembangan wawasan kebangsaan HUT-RI	20.225.400,-	20.225.400,-	
15	Pelaksanaan Hut RI	20.225.400,-	20.225.400,-	100
e	Program Peningkatn disiplin aparatur	12.125.000,-	12.125.000,-	
16	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan	12.125.000,-	12.125.000,-	100
f	Program dan pembinaan pasilitas dan pengelolaan keuangan	33.473.340,-	33.447.800.-	99,92
17	Pembinaan pengelolaan keuangan Nagari	33.473.340.-	33.447.800,-	99,92
g	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.538.440.-	10.538.400,-	100
18	Distribusi Raskin	10.538.440,-	10.538.400,-	100
h	Program pembangunan wilayah Kecamatan	113.972.490,-	113.480.650,-	
	Pasilitas penyelenggaraan adm terpadu	22,609.680,-	22.197.100,-	98,18
19	Pembinaan PKK Kecamatan	31.408.400,-	31.374.400.-	99,89
20	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong	18.253.460.-	18.253.400.-	99,89
21	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	19.256.980,-	19.240.900,-	99,89
22	Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana	12.288.810,-	12.288.750,-	100
23	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	10.146.160,-	10.146.100,-	100

25	Pelaksanaan Vestifal Langkisau	12.972.500,-	12.972.500,-	100
	Jumlah	525.981.300,-	519.512.910,-	97,63

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman lebih bagi aparata pengelola keuangan dan Sistim Informasi Keuangan Daerah yang tidak bisa diakses dari kecamatan yang terkendala jarak dan jaringan sistim informasi di kecamatan yang masih kurang mendukung.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan). Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh PPKD yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana pada kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan fungsinya.

Program dan kegiatan TA. 2017 pada Kantor Camat Bayang adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan

Enitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan dengan enitas pelaporan keuangan. Sedangkan Enitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Enitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan). Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh PPKD yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Enitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugasnya.

Adapun program dan kegiatan TA. 2017 pada Kantor Camat Bayang adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Peyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2	Penyedian jasa administari keuangan
3	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyedian Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan
8	Penyediaan makan dan minum
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
14	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
15	Pengadaan peralatan gedung kantor
D	Program Pengembangan wawasan kebangsaan
E	Program peningkatan disiplin aparatur
F	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan
G	Prgram pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
I	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
16	Pembinaan PKK Kecamatan
17	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong
18	Perencanaan Pembangunan Kecamatan
19	Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
20	Koordinasi muspika dan pembinaan
21	Pasilitas peyelenggaraan administrasiterpadu Kecamatan
J	Pergram pengembangan dan pemasaran pariwisata

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basic) dan Basis Akrua (Accrual Basic). Pada Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas bendaharawan. Basis Kas dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua dipergunakan dalam penyusunan Neraca dimana asset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat

kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrua dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan berbasis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai asset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Asset harus dicatat/ diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat/ diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/ diukur sebesar selisih antara asset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Contoh :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	59.473.210,-	59.447.800
2	Belanja Bahan Baku	20.820.000,-	19.559.360
3	Belanja Perawatan	12.763.850,-	12.625.450,-
4	Belanja Cetak dan	21.226.240,-	21.289.000,-
5	Belanja Lain-lain	6.120.000,-	6.050.000,-
6	Belanja Makanan dan	93.225.000,-	93.224.500
7	Koordinasi luar daerah	120.395.000,-	120.300.000,-
8	Koordinasi dalam daerah		

- Pencatatan asset berdasarkan harga perolehan

Telah sesuai standar akuntansi pemerintah

- Terhadap asset daerah belum dilakukan penyusutan

Belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bagi OPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

1. Belanja

a) Belanja Pegawai

Dianggarkan sebesar Rp. 1.800.489.556,- terealisasi Rp 1.752.154.616,-, dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2. Rincian Belanja Pegawai

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG	1.800.489.556,--	1.752.154.616,-
Gaji dan Tunjangan	1.603.089.556,--	1.556.854.616,--
Tambahan Penghasilan PNS	197.400.000, -	195.300.000,-
Total Belanja Pegawai	3.600.979.112,-	3.504.309.232,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan sebesar Rp.455.026.300,- terealisasi sebesar Rp. 448.576.410,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	59.473.210,-	59.447.800
2	Belanja Jasa kantor	20.820.000,-	19.559.360
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.763.850,-	12.626.350,-
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.296.240,-	21.289.000.-
5	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6.120.000,-	6.050.000,-
6	Belanja Makanan dan Minuman	93.225.000,-	93.224.500,-
7	Belanja rapat rapat dan koordinasi luar daerah	39.650.000,--	39.650.000.
8	Belanja rapat rapat dan koordinasi dalam daerah	120.395.000,-	120.300;000,-

9	Belanja jasa administrasi keuangan	51.402.850,-	51.391.450,-
10	Belanja bahan material	3.303.000,-	3.303.000,-
11	Belanja komponeinstalasi listrik	6.124.590,-	6.124.500,-
	Jumlah	474.223.740,-	432.965.960,-

c) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp. 70.955.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.936.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan perlengkapan kantor	70.755.000,-	70.736.500,-
2	Pengadaan rumah tangga lainnya	200.000,-	200.000,-
	Jumlah	70.955.000,-	70.936.500,-

2. Aset

1) Aset Lancar

Kas pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,- karena sisa UYHD per 31 Desember sebesar Rp. 0,- telah disetor pada tanggal 23 Desember 2017 yang terdiri dari pengembalian sisa UP sebesar Rp.0,-.

Persediaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0,- sama dengan persediaan per 31 Desember 2018, yang berarti pengelolaan persediaan sudah sangat baik.

2) Aset Tetap

✓ Tanah

Saldo Awal tanah tahun 2015 sebesar Rp. 270.912.748,- dan sepanjang tahun 2016 tidak ada perubahan saldo tanah.

✓ Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebesar Rp. 454.005.642,-. Selama TA 2017 terdapat penambahan mutasi sebesar Rp. 57.940.000,- sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 desember 2017,- menjadi Rp. 57.940.000,-

✓ Bangunan dan Gedung

Tidak terdapat perubahan saldo bangunan dan gedung sepanjang TA 2016 Rp.504.457.075,- sehingga tetap sama dengan saldo awal tahun 2017,- sebesar Rp.504.457.075,-

✓ Jalan , Irigasi dan Jaringan

Saldo awal tahun 2016 sebesar Rp. 500.000,-, dan terdapat penambahan mutasi sepanjang tahun 2017 yaitu belanja pengadaan smarsity senilai Rp. 12.996.500,- sehingga saldo per 31 desember 2017 menjadi Rp. 12.996.500,-

✓ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal tahun 2016 Rp. 629.167,- dan sepanjang tahun 2016 tidak ada perubahan, sehingga saldo per 31 Desember 2017 tetap sebesar Rp. 629.167,-

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di tahun 2016 kita mengkaji lebih efektif dan efisien melalui perhitungan surplus/ defisit.

URAIAN EKUITAS DANA	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)

BAB VI		
PENUTUP		
EKUITAS DANA LANCAR	(4.543.335.052)	(1.220.454.632)
Silpa	54.803.330,-	(264.240.867)
Surplus/ Defisit	(2.271.667.528)	(2.343.007.564)
EKUITAS DANA INVESTASI	4.543.335.052	3.572.582.196,-
Diinvestasikan dalam asset tetap	856.153.490	785.416.990,-
	4.543.335.052,-	
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.271.667.526,-	3.572.582.196,-
Rk Ppkd	2.271.667.526,-	2.352.127.564,-
Jumlah Ekuitas Dana	4.543.335.052,-	3.572.582.196,-

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya aparatu kecamatan.
2. Diperlukannya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intens tentang aturan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, terlebih bagi aparatur yang masih baru di bidang keuangan.

Pasareh, 17 Januari 2019

CAMAT PASAREH

ILHAM RAMADHAN PUTRA S SIP

NIP.19830523 200212 1002

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari uraian CaLK SKPD Kantor Camat Bayang tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan atau kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran OPD tahun 2017. Hanya ada sedikit kendala dalam jarak dan jaringan SIPKD yang tidak bisa diakses dari kecamatan.

6.2. Saran

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya aparatu kecamatan.
2. Diperlukansosialisasi dan pelatihan yang lebih intens tentang aturan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, terlebih bagi aparatur yang masih baru di bidang keuangan.

Pasar Baru 10 Januari 2018

CAMAT BAYANG

ILHAM RAMADSYAH PUTRA.S.SIP

NIP.19830523 200212 1002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

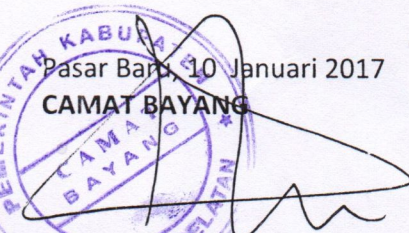
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana posisi keuangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Anggaran Rp 2.326.470.856,-
- Jumlah SP2D Rp. 2.272.612.526,
- Jumlah Realisasi Rp. 2.272.612.526,-
- Sisa UYHD Rp
- Contra Post Rp. 945.000,-
-

Pasar Baru, 10 Januari 2017
CAMAT BAYANG

ILHAM RAHMADSYAH P. SSTP
Nip. 19830523200212 1 002